

Pengawasan Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

DAFTAR ISI

Mengapa gender penting untuk pengawasan masyarakat sipil?

Bagaimana cara gender dapat dipadukan dalam pengawasan masyarakat sipil?

Tantangan dan peluang pasca konflik

Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan OMS

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan. Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat mengenai manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukan pemaduan tersebut.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool (Alat) dengan Catatan Praktisnya - *lihat Informasi lebih lanjut*.

Mengapa gender penting dalam pengawasan masyarakat sipil?

Pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan, termasuk RSK, meliputi partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam merumuskan kebijakan keamanan dan mengawasi struktur-struktur dan praktek-praktek para aktor sektor keamanan.¹ Tujuan adalah menjamin keterpaduan kepentingan dan perspektif dari tingkat masyarakat dan akar rumput dalam penyediaan keamanan internal dan eksternal, dan mendorong pemilikan lokal dan keberkelanjutan. OMS mengambil bagian dalam pengawasan sektor keamanan dengan berbagai cara, termasuk nasehat kebijakan dan keahlian teknis pemantauan, peningkatan kesadaran, serta penelitian dan analisis.

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang hasil konstruksi sosial pada lelaki dan wanita. Oleh karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Menguatkan pemilikan lokal

- Pemaduan isu-isu gender dan pelibatan organisasi-organisasi wanita dapat menyebabkan timbulnya pemilikan lokal terhadap proses-proses RSK dengan cara memastikan pelibatan pria maupun wanita dan pemberian kesempatan untuk menyatakan kebutuhan, pendapat dan prioritas-prioritas mereka yang tertentu. Hal ini menjadikan institusi keamanan lebih bersifat mewakili, bertanggungjawab dan terpercaya di mata rakyat.

Pengawasan komprehensif melalui pemaduan isu-isu gender

- Pengawasan sektor keamanan yang memantau bagaimana cara kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga keamanan dan peradilan menangani kekerasan berbasis gender (GBV) dapat memperkuat penyediaan keamanan dan peradilan.



Di Malaysia, OMS seperti Organisasi AID Wanita (Women's AID Organisation) telah memantau penegakan dan efikasi Undang-Undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Malaysia, dan juga pengantaran layanannya kepada para korban. Temuan-temuan digunakan untuk mengadvokasi perbaikan-perbaikan dalam isi pokok dan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di Cambodia, organisasi-organisasi wanita dan kelompok-kelompok HAM seperti LICADHO sedang bekerja sama dengan badan-badan pengawasan pemerintah untuk meneliti dugaan penganiayaan dan memantau kepatuhan dengan Undang-Undang mengenai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Korban yang baru disahkan. Undang-undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada polisi untuk ikut campur dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sambil memperkuat perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Selain pemantauan, OMS tersebut menyediakan bantuan hukum dan tempat penampungan bagi korban.

- Pengawasan sektor keamanan yang menanggung-jawabkan lembaga-lembaga sektor keamanan dengan menjalankan tempat kerja yang non-diskriminatif dan mencegah pelecehan seksual dan bentuk-bentuk GBV lainnya dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional .
 - Pengawasan sektor keamanan yang menanggung-jawabkan lembaga-lembaga sektor keamanan meningkatkan rekrutmen, retensi dan kemajuan para wanita dan kelompok-kelompok yang kurang terwakili lainnya dapat memperkuat kepercayaan umum dan efektivitas.
- Mempermudah dialog antara masyarakat lokal dan badan-badan pengawasan sektor keamanan.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana cara menanggung jawabkan lembaga-lembaga sektor keamanan.

Pengawasan yang efektif melalui keterlibatan organisasi-organisasi wanita

- Organisasi-organisasi wanita sering merupakan sumber daya yang belum disadap untuk pengawasan sektor keamanan. Mereka dapat memperkuat pengawasan melalui:
 - Memberikan nasihat kebijakan mengenai peningkatan transparansi, pertanggungjawaban dan ketanggapan.
 - Memantau pelaksanaan persetujuan internasional dan regional, dan juga kebijakan nasional dan kelembagaan.
 - Menyediakan pembangunan kemampuan untuk badan-badan pengawasan mengenai isu-isu gender.
 - Mengidentifikasi ancaman keamanan dan isu-isu yang dihadapi individu dan masyarakat.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional

Mengambil prakarsa memadukan isu-isu gender dalam pengawasan masyarakat sipil tidak hanya merupakan masalah efektivitas operasional tetapi juga diperlukan untuk mematuhi undang-undang, instrumen hukum dan norma internasional dan regional mengenai keamanan dan gender. Instrumen hukum pokok meliputi:

- Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Bagaimana cara gender dapat dipadukan dalam pengawasan masyarakat sipil?

Badan-badan pemantauan sektor keamanan

- Kuatkan partisipasi organisasi wanita dalam berbagai badan pengawasan sektor keamanan resmi, seperti badan pemeriksa orang sipil, komisi pengaduan masyarakat, tim teknis pakar dan kelompok pemantau independen (lihat Kotak 1).
- Masukkan isu-isu gender, seperti pencegahan GBV atau peningkatan perekrutan wanita, ke dalam agenda badan-badan pemantauan sektor keamanan.

Penelitian dan pengumpulan data

- Jamin agar isu-isu gender dipadukan dalam penilaian atau pengkajian ulang internal dan eksternal lembaga dan kebijakan sektor keamanan.
- Jamin agar semua data dipisahkan menurut jenis kelamin. Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin menyoroti keadaan pria dan wanita yang berbeda dan merupakan landasan yang diperlukan untuk layanan keamanan yang adil.
- Lanjutkan audit gender terhadap suatu lembaga atau suatu kebijakan sektor keamanan.
- Lakukan analisis gender terhadap proses RSK dan menyebarkan temuan dan rekomendasi melalui media dan kepada para pejabat pemerintah dan donor.
- Lakukan analisis anggaran gender terhadap pengeluaran pemerintah untuk keamanan dan pertahanan atau anggaran suatu lembaga sektor keamanan tertentu, agar memahami dengan lebih baik dampak khususnya terhadap pria dan wanita. Gunakan temuan-temuan ini sebagai alat untuk advokasi.
- Jamin agar pelibatan para wanita dan organisasi-organisasi wanita dalam semua proses audit, penilaian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi yang dilakukan oleh OMS.

Advokasi dan peningkatan kesadaran

Gunakan penelitian yang peka terhadap gender dan hasil dari proses penilaian dan pengumpulan data untuk mengembangkan kampanye informasi publik dan advokasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan gender – seperti peningkatan kesadaran masyarakat bagaimana cara melaporkan GBV kepada polisi atau melobi untuk memperoleh pendanaan pemerintah untuk program-program pencegahan kekerasan senjata.

- Identifikasi cara-cara untuk menyampaikan informasi ini kepada rakyat yang terpinggirkan (seperti masyarakat pedesaan, wanita yang buta huruf, atau masyarakat etnis) yang bahasanya mungkin berbeda dari bahasa yang dominan.
- Targetkan advokasi pada tingkat-tingkat yang berbeda - lokal, provinsi dan nasional - untuk menjangkau para pembuat kebijakan utama yang dapat mempengaruhi perencanaan dan penyusunan sektor keamanan.
- Libatkan media setempat dengan cara menyebarkan informasi melalui surat kabar kecil, stasiun radio masyarakat dan stasiun televisi lokal, serta gerai media pemerintah.
- Bekerja sama dengan media untuk menjadikan para wartawan dan orang lainnya peka terhadap dimensi gender dalam isu-isu keamanan dan peradilan.
- Libatkan pria di kampanye advokasi, khususnya yang menanggulangi kekerasan terhadap perempuan (lihat Box 2).

Latihan gender

Organisasi-organisasi wanita dan OMS yang memiliki keahlian gender dapat mendukung pengembangan dan pengantaran pelatihan gender bagi personel sektor keamanan (lihat Box 3), meliputi dengan cara:

- Lakukan penilaian kebutuhan pelatihan.
- Kembangkan bahan-bahan pelatihan gender dan menyampaikan pelatihan.
- Kembangkan kurikulum standar pelatihan gender yang dapat disesuaikan dan digunakan para pelatih.
- Lobi untuk kebijakan-kebijakan yang memandatkan pelatihan gender komprehensif.
- Buat daftar pelatih masyarakat sipil yang dapat memberikan pelatihan gender.

OMS yang partisipatif dan efektif

OMS yang terlibat dalam pengawasan sektor keamanan juga berkewajiban merevisi kebijakan dan praktik internal sehingga mempromosikan kesetaraan gender dan memastikan kemampuan mereka dalam hal isu-isu gender:

- Kembangkan kebijakan dan prosedur mengenai gender dan kesempatan yang sama yang

Tersedia juga di Alat (Tool) 9...

- Tahap-tahap audit gender RSK
- Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan ketika merencanakan kampanye advokasi
- Kiat bekerja sama dengan media
- Topik-topik pelatihan untuk membangun kemampuan pengawasan LSM wanita
- Bagaimana cara memperkuat legitimasi jaringan-jaringan masyarakat sipil
- Contoh-contoh dari Eropa Timur, Fiji, Irak, Rusia, Afrika Selatan, Inggris dan Afrika Barat

menangani isu-isu sumber daya manusia, praktek perekrutan, syarat prestasi kerja serta pelecehan seksual dan diskriminasi.

- Berikan pelatihan gender untuk semua staf – termasuk pelatihan mengenai metodologi pengumpulan data dan penelitian yang peka terhadap gender.
- Arusutamakan isu-isu gender ke dalam tugas pengawasan sektor keamanan.
- Lakukan audit gender internal untuk menilai kemampuan organisasional.

Tantangan dan peluang pasca konflik

OMS mungkin jadi terpecah atau lemah selama konflik dan akibatnya tidak memiliki jangkauan, legitimasi atau kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan mereka secara efektif. Dalam kasus lain, kerja sama OMS bisa meningkat pada masa pasca-konflik karena reformasi angkatan bersenjata dan kepolisian serta ketidakamanan menjadi masalah utama banyak organisasi, sehingga memberi OMS kesempatan untuk bekerja sama.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender

- Kemampuan lembaga-lembaga negara sering begitu lemah sehingga walaupun ada kemauan politik, alat-alat untuk menyediakan layanan keamanan dan peradilan tidak tersedia dalam pengertian sumber daya teknis, sumber daya finansial atau sumber daya manusia.
- Undang-undang, struktur dan mekanisme untuk

Kotak 2

Melibatkan pria dalam memberantas kekerasan terhadap wanita

Kampanye Pita Putih (WRC, White Ribbon Campaign) dimulai di Kanada pada tahun 1991 oleh sekelompok pria untuk mengadvokasi pengakhiran kekerasan terhadap wanita dan mendidik para pria lain mengenai isu tersebut. Melalui kampanye peningkatan kesadaran, pernyataan publik, dan jaringan mereka yang terus berkembang, para anggota WRC memberikan visi alternatif pria sebagai orang yang tidak suka melakukan kekerasan dan memberikan model peran positif bagi para pria dan anak lelaki di dalam masyarakat di seluruh dunia.³

Kotak 3**Pendidikan kesehatan seksual untuk angkatan bersenjata di Mongolia ⁴**

LSM Mongol Vision bekerja pada isu-isu kesehatan reproduksi dengan para prajurit dan perwira di angkatan bersenjata Mongolia:

Isu: Anggota baru Angkatan Bersenjata Mongolia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan mengenai HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS). Karena itu, tingkat IMS relatif tinggi di kalangan perwira dan prajurit.

Tujuan: Mendapatkan dukungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Mongolia untuk meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS, IMS dan kesehatan reproduksi di kalangan perwira dan prajurit.

Pemangku kepentingan utama: Kementerian Pertahanan dan Mabes Angkatan Bersenjata Mongolia.

Pemangku kepentingan primer: Prajurit/perwira dan pasangan seks mereka.

Pendekatan dan komunikasi: Surat-surat dikirim kepada Kementerian Pertahanan dan markas besar angkatan bersenjata; pertemuan resmi dan tak resmi diadakan dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah proyek disiapkan bekerja sama dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah lokakarya diselenggarakan bersama para pejabat tingkat tinggi; para perwira komando dan dokter satuan militer menyajikan laporan mengenai situasi STI saat ini di kalangan personel angkatan bersenjata.

Indikator keberhasilan dan keberlanjutan: Kesehatan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan resmi untuk staf militer; peningkatan kesadaran para perwira tingkat tinggi; peningkatan dukungan dari Kementerian Pertahanan.

Kotak 4**Contoh daftar periksa gender untuk badan pengawasan sektor keamanan dalam konteks pasca-konflik**

- ✓ Bagaimana cara masyarakat sipil, termasuk para wanita, dilibatkan dalam proses-proses pengawasan?
- ✓ Bagaimana cara kebutuhan keamanan khusus wanita dan pria diketahui dan dipenuhi?
- ✓ Berapa jumlah pria dan wanita bekerja dalam militer, kepolisian, badan intelijen, polisi perbatasan, pabean, imigrasi dan badan penegakan hukum lainnya, dan sebagai apa (persentase wanita/pria, menurut pangkat dan kategori)?
- ✓ Apakah langkah-langkah ditetapkan untuk menjamin agar wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam setiap lembaga keamanan?
- ✓ Apakah pelatihan gender diberikan kepada polisi, militer dan untuk Pihak Kepolisian, militer dan badan keamanan lainnya?
- ✓ Langkah-langkah apa ditetapkan untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum GBV yang dilakukan personel sektor keamanan?
- ✓ Apakah ada pendanaan yang memadai untuk penencanaan dan penyusunan yang terkait dengan gender?

mencegah dan merespons GBV jarang tersedia atau berfungsi sebagaimana mestinya.

- Personil sektor keamanan mungkin telah melakukan pelanggaran HAM dan mungkin terus melakukan pelanggaran di masa damai.

Peluang bagi pemaduan isu gender

- Proses-proses RSK dapat membuka ruang politik untuk masukan OMS dalam pembuatan keputusan keamanan dan peradilan, yang merupakan kesempatan untuk mengajukan isu-isu gender.
- Bukti-bukti menunjukkan bahwa peran dan hubungan gender sering berubah selama dan setelah konflik, yang dapat membuka ruang penting untuk merundingkan pemaduan isu-isu gender dan peningkatan perekrutan wanita.
- Donor-donor mungkin bersedia memberikan dukungan kepada OMS agar kemampuan pengawasan mereka yang tanggap terhadap gender.

Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada OMS

Salah satu cara yang paling baik untuk mengidentifikasi titik-titik masuk untuk memadukan isu-isu gender ke dalam proses RSK adalah organisasi

masyarakat sipil melakukan suatu penilaian. Berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat OMS liputi dalam penilaian, pemantauan dan evaluasi.

- Apa kebutuhan, persepsi dan prioritas keamanan dan peradilan khusus pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki?
- Apakah personil sektor keamanan mampu merespons semua kebutuhan ini? Kalau tidak, kenapa tidak?
- Apakah wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan dapat mengakses layanan keamanan dan peradilan dengan setara?
- Apakah perundang-undangan, kebijakan dan protokol tanggap terhadap gender? Apakah ada perundang-undangan yang memadai terhadap GBV?
- Apakah wanita dapat mengakses secara penuh dan setara pekerjaan di lembaga-lembaga sektor keamanan?
- Bagaimana lingkungan kerja di lembaga-lembaga sektor keamanan? Apakah ada masalah pelecehan seksual dan penghalang lainnya yang menghambat kemajuan wanita?
- Apakah badan-badan pengawasan sektor keamanan meliputi wanita dan melakukan konsultasi dengan organisasi-organisasi wanita?

- Apakah badan-badan pengawasan sektor keamanan memantau isu-isu yang terkait dengan GBV dan kesempatan yang sama bagi pria dan wanita?

Informasi lebih lanjut

Sumber daya

Amnesti Internasional (Amnesty International) – *Monitoring and Reporting Human Rights Abuses in Africa: A Handbook for Community Activists (Memantau dan Melaporkan Pelanggaran HAM di Afrika: Buku Panduan untuk Aktivis Masyarakat)*, 2002.

Amnesti Internasional (Amnesty International) – *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists (Memahami Perpolisian: Sumber Daya untuk Aktivis HAM)*, 2006.

DCAF – *Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Publik atas Sektor Keamanan: Buku Panduan bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratik)*, akan terbit 2008.

Family Violence Prevention Fund (Dana Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga) – *Toolkit for Working with Men and Boys to Prevent Gender-Based Violence* - (Toolkit bagi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pria dan Anak Lelaki untuk Menghindarkan Kekerasan Berbasis Gender), 2003.

International Alert and Women Waging Peace (Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian) – *Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action* (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Advokasi dan Tindakan), 2004.

OECD DAC – *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice* (Buku Pedoman OECD DAC mengenai Reformasi Sistem Keamanan, Mendukung Keamanan dan Peradilan), 2007.

Organisasi-organisasi

DCAF – www.dcaf.ch

International Alert (Kewaspadaan Internasional) – www.international-alert.org

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security (Portal UNIFEM mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan) –

www.womenwarpeace.org

UN-INSTRAW – www.un-instraw.org

WILPF Peacewomen (WILPF Wanita Perdamaian) – www.peacewomen.org

Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
2. Reformasi Kepolisian dan Gender
3. Reformasi Pertahanan dan Gender
4. Reformasi Peradilan dan Gender
5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender
6. Manajemen Perbatasan dan Gender
7. Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender
8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender
9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender
10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender
11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional

Tiap-tiap Alat dan Catatan Praktis tersedia dari: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org dan www.osce.org/odihr.

Catatan praktik ini disiapkan Rahim Kanani, UN-INSTRAW, berdasarkan atas Tool (Alat) 9, para penulis Karen Barnes dan Peter Albrecht, International Alert (Kewaspadaan Internasional).

¹DCAF and IPU, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme dan Praktik), DCAF and IPU, 2003, p. 22. http://www.dcaf.ch/oversight/_publications.cfm?navsub1=12&navsub2=3&n_av1=3

² IPU (Persatuan Antar-Parlemen), Women in National Parliaments (Wanita di Parlemen Nasional), 31 Oktober 2007. <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>

³ Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African Women (Merundingkan Transisi menuju Demokrasi dan Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika Selatan), (Initiative for Inclusive Security: Washington DC) , 2004, h. 17-18; 23-25.

Washington DC) , 2004, h. 17-18; 23-25.

⁴ Isha L'Isha News Release (Siaran Berita Isha L'Isha [Wanita kepada Wanita] (21 Juli 2005), Parliament/Knesset Passes New Law Mandating Inclusion of Women for Peace and Security Negotiations & Policy (Parlemen/Knesset Menyetujui Undang-undang Baru yang Mengharuskan Pelembutan Wanita dalam Perundingan dan Pembuatan Kebijakan Perdamaian dan Keamanan). <http://www.peacewomen.org/news/Israel-OPT/July05/Knesset.html>

⁵ IPU (Persatuan Antar-Parlemen), Women in Politics (Wanita dalam Politik). <http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm>; Mosadiq, The New Afghan Constitution (Undang-undang Dasar Afghanistan yang Baru).

